

ABSTRAK

Permasalahan pengangkatan anak di Indonesia sangatlah kompleks. Salah satunya adalah mengenai kedudukan hukum terhadap anak angkat juga termasuk hak-hak untuk dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya atautidak. Dikarenakan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya melakukan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai prosedur pada peraturan pemerintah dan masih sedikitnya lembaga hukum yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak maka kedudukan dan status anak angkat tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang kuat, sehingga sering sekali terjadi perselisihan didalam sebuah keluarga mengenai bagian waris anak angkat tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan MA No. 3218K/Pdt/2003)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia agar kedudukan anak angkat mempunyai kepastian hukum, mengetahui kedudukan bagian hak waris anak angkat, mengetahui analisis yuridis mengenai putusan Mahkamah Agung terkait bagian waris anak angkat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, sumber data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dan hasil dokumentasi berkas perkara putusan Mahkamah Agung dan diperoleh dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan pustaka, metode analisis data adalah metode *analisis kualitatif*. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kedepannya anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan pasti, namun masyarakat pada umumnya tidak melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan pemerintah melainkan hanya melalui adat istiadat didaerah masing-masing. Mengenai hak waris anak angkat menurut *Staatsblaad* 1917 No. 129 anak angkat menjadi ahli waris dan mendapat bagian harta waris dari orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum islam anak angkat tidak bisa dijadikan ahli waris dan tidak dapat bagian harta waris orang tua angkatnya melainkan bisa diberi hibah atau wasiat wajibah dengan bagian 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya, berbeda halnya dengan hukum adat dimana masyarakat adat memberi hak waris sesuai dengan hukum adat dan nilai-nilai adat yang berlaku didaerah masing-masing. Terakhir mengenai analisis putusan Mahkamah Agung dalam hal ini penulis setuju bahwa anak angkat berhak atas waris orang tua angkat karena keseluruhan harta waris dalam kasus tersebut adalah murni harta gono-gini dari orang tua angkatnya, secara yuridis putusan tersebut sudah sesuai dan dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam kasus yang serupa.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pengangkatan Anak – Hak Waris Anak Angkat.

ABSTRACT

The problem of adoption of children in Indonesia is very complex . One of them is the position of the law against child lift also includes the rights to be able to inherit property relics of the old adoptive or not. Because the Indonesian people have not fully carried out procedures for the adoption of children in accordance with procedures on regulation of government and still at least institute laws that are specially arranged on the appointment of a child then the position and status of children adopted did not have the strength and certainty of law which is strong , so often so happens dispute within a family regarding the part of inheritance of children adopted such. Based on the background behind the problems the author will discuss the thesis with the title " *Analysis of Decision The Supreme Court Concerning the Rights of Inheritance Children Lift (Study Case Verdict MA No. 3218K / Pdt / 2003)*". This study aims to determine how the implementation of adoption in Indonesia so that the position adopted children have legal certainty, knowing the position of part of the inheritance rights of children angkat, shortly analysis of the Supreme Court judgment juridical the inheritance foster child. The method used in this study is a research method *Juridical Normative*, research specifications *descriptive analitif*, sources dat a study is data secondary were obtained and the results of the documentation file case verdict Supreme Court and obtained by reading and reviewing the materials libraries, methods of data analysis is methods *of qualitative analysis*. The conclusion in the thesis of this is in Rule Government No. 54 In 2007 the implementation of the removal of the child should be through the establishment of the court in accordance with the procedures that apply so that the future of children adopted has the position of law that is strong and sure, but people in general do not carry out the removal of the child in accordance with the rules pemerintah but only through the traditional customs area respectively. Regarding the inheritance rights of adopted children according to *Staatsblaad* 1917 No. 129 children adopted into expert heir and got a part treasure heir of the old adoptive, while the law of Islam child lift not be used as an expert heir and not be part of the treasure of inheritance the parents adopted but could be given a grant or a will wajibah with section 1/3 of treasure heir the old adoptive, different from the case with legal custom in which people of indigenous members of the right of inheritance in accordance with the law of customs and values of the indigenous who apply area respectively . Recently rmengenai analysis of the decision of Supreme Court in the case of this writer agrees that children adopted has the right on inheritance the old lift for the whole property inheritance in case it is a pure treasure Gono-gini of the parents adoptive , in judicial decision that has been appropriate and may be used as guidelines for the community in case the same .

Keywords: Implementation of Adoption of Children - Inheritance Rights of Adopted Children.